

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai politik adalah fitur esensial dari sistem negara demokratis, dicirikan oleh adanya kebebasan untuk berorganisasi termasuk membentuk kelompok politik. Dalam ranah politik kepartaian, partai berfungsi sebagai penghubung utama (*intermedia*) antara rakyat (warga negara) dan struktur kekuasaan (negara atau pemerintah). Partai memiliki fungsi sentral untuk menghimpun beragam kepentingan masyarakat, mengolahnya menjadi agenda, dan kemudian mengembangkan agenda tersebut menjadi kebijakan publik. Secara teoretis, fungsi ideal partai politik sebagai organisasi adalah memobilisasi masyarakat, mencerminkan aspirasi publik, menyediakan mekanisme untuk mendamaikan perbedaan pandangan, dan memfasilitasi peralihan (*suksesi*) kepemimpinan politik secara sah dan damai.

Kapasitas partai politik yang demokratis untuk mengejawantahkan tujuan masyarakat ke dalam kebijakan publik adalah unsur paling krusial dari keberadaannya. Oleh karena itu, partai politik bukan hanya berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kursi kekuasaan, melainkan merupakan kebutuhan substantif bagi masyarakat. Melalui fungsi sentral ini, partai politik memiliki kendali efektif atas kebijakan publik yang secara langsung memengaruhi kehidupan warga negara.¹

Sebuah teori mengemukakan bahwa krisis historis dalam suatu situasi muncul ketika sistem politik memasuki fase transisi. Perubahan ini dipicu oleh evolusi masyarakat dari tatanan tradisional yang strukturnya masih sederhana menuju masyarakat modern dengan struktur yang lebih kompleks. Dalam kondisi transisi tersebut, serangkaian perubahan terjadi, termasuk: lonjakan populasi akibat peningkatan fasilitas kesehatan, perluasan akses pendidikan, peningkatan mobilitas pekerjaan, pergeseran dari pola pertanian ke industri, peningkatan partisipasi

¹ Bernadus Seran, Elpius, *PARTAI POLITIK: Pelaksanaan Fungsi Representasi Politik*, (Malang, Literasi Nusantara Abadi: 2022), hlm. 1-4.

media, arus urbanisasi, adopsi sistem ekonomi berbasis pasar, meningkatnya aspirasi serta harapan baru, dan kemunculan gerakan popokan (populis).

Tentu, ini adalah beberapa versi parafrasa dari teks tentang krisis legitimasi, integrasi, dan partisipasi, serta peran partai politik sebagai solusinya.

Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut memicu tiga jenis krisis utama: legitimasi, integrasi, dan partisipasi. Krisis-krisis ini berarti bahwa masyarakat mulai mempertanyakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi sandaran kewenangan pihak penguasa (legitimasi); munculnya tantangan terhadap identitas yang mempersatukan masyarakat sebagai sebuah bangsa (integrasi); dan meningkatnya permintaan dari publik untuk terlibat dalam proses politik (partisipasi).

Untuk mengatasi ketiga masalah krusial ini, partai politik dibentuk. Partai yang memiliki akar kuat di tengah masyarakat diharapkan mampu mengontrol pemerintahan demi menciptakan pola hubungan kewenangan yang sah antara pemerintah dan rakyat. Selain itu, partai politik yang bersifat inklusif, terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat—termasuk berbagai unsur etnis, agama, daerah, dan status sosial ekonomi—diharapkan dapat berfungsi sebagai alat pengintegrasи bangsa. Terakhir, melalui keikutsertaan dalam pemilihan umum sebagai sarana sah untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan, partai politik juga diharapkan menjadi saluran bagi partisipasi politik masyarakat. Singkatnya, teori ini berpendapat bahwa perubahan menciptakan tiga krisis, dan partai politik didirikan untuk menanggulangi krisis-krisis tersebut.²

Dalam sejarahnya, Indonesia telah menerapkan sistem multi-partai segera setelah mencapai kemerdekaan. Penerapan ini secara resmi dikukuhkan oleh Surat Keputusan Wakil Presiden M. Hatta Nomor X/1945. Keputusan penting ini juga merupakan langkah awal dalam mempersiapkan Pemilu pertama yang kemudian diselenggarakan pada 1955.³ Pemilu pertama tahun 1955, yang berlangsung di era Kabinet Burhanuddin Harahap, dilaksanakan dalam dua tahap. Pada pemilihan Parlemen, PNI berhasil mendominasi dengan meraih 8.434.653 suara, setara

² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 1992), hlm. 113-114.

³ Djoni Gunanto, *Multipartai Dalam Sistem Kepartaian Indonesia Pasca Reformasi*, Jurnal KAIS, Vol 1 No 2, 2020, hlm. 148.

dengan 57 kursi di Parlemen. Selanjutnya, pemilihan Konstituante diikuti oleh total 91 kontestan, terdiri dari 39 parpol, 23 ormas, dan 29 individu. Dalam Pemilu Konstituante ini, PNI kembali memimpin dengan total 9.070.218 suara dan mendapatkan 119 kursi.⁴

Keruntuhan Orde Baru menyisakan sejumlah kekacauan, termasuk ekonomi yang goyah, namun di sisi lain memberikan manfaat besar. Bagi partai politik Islam yang selama 30 tahun terpinggirkan dan disatukan paksa ke dalam PPP, masa ini menandai kebangkitan dengan lahirnya berbagai partai Islam baru. Pasca-Orde Baru, sistem politik Indonesia bergeser dari otoritarianisme menuju demokrasi. Perubahan paling nyata adalah adanya kebebasan terjamin untuk berserikat dan berpendapat, termasuk dalam membentuk partai politik. Berbekal keyakinan bahwa Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, kelompok Islam memanfaatkan jalur politik sebagai sarana untuk berkontribusi dalam pembangunan negara.⁵

Institusi politik bernama partai politik merupakan elemen inti dari sistem demokrasi. Hal ini meniscayakan adanya penegasan bahwa demokrasi mustahil ada tanpa partai politik. Definisi mengenai partai politik telah banyak ditemukan dalam berbagai referensi studi politik. Salah satunya adalah definisi yang dikemukakan oleh Soltau, yang dinukil oleh Bambang Sunggono.

Menurut Soltau, partai politik dapat didefinisikan sebagai kelompok warga negara yang terstruktur, kurang lebih, sebagai kesatuan politik. Kelompok ini berupaya mencapai tujuannya, yaitu menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan publik mereka, melalui pemanfaatan hak dan kekuatan suara dalam pemilihan.

Mengesampingkan keragaman definisi partai politik yang mencakup penggunaan ideologi atau tidak, jelas terlihat bahwa di Indonesia, semua partai

⁴ Andi Suwirta, *Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru: Kasus PEMILU 1971 dalam Pandangan Harian Kompas di Jakarta dan Harian Pikiran Rakyat di Bandung*, Jurnal Sipatahoenan, Vol 5 No 1, 2019, hlm. 35-36.

⁵ Abdul Rahman, dkk, *Desakralisasi Partai Politik Islam Pada Awal Reformasi di Indonesia*, Jurnal Pendidikan dan Sejarah Vol. 8, (2022), hlm. 50-52.

politik masih bersandar pada ideologi sebagai landasan utamanya. Ideologi yang dominan digunakan pada umumnya adalah Pancasila dan Islam.⁶

Zainal Abidin Amir mendefinisikan partai Islam sebagai berikut:

“Anggota masyarakat yang berkelompok dalam organisasi dengan simbol-simbol Islam (nama, asas, struktur organisasi dan tanda gambar) dan berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan untuk merealisasikan kepentingan ummat Islam pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. Atau anggota masyarakat yang bergabung dalam suatu organisasi yang tidak menggunakan simbol Islam, namun susunan kepemimpinannya didominasi oleh kelompok Islam santri serta pengambilan keputusan di tingkat internal partai banyak memihak kelompok Islam, berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, serta basis sosial utamanya terdiri dari golongan Islam tertentu. Program atau tujuan partai diarahkan bagi kepentingan seluruh rakyat tanpa terkecuali”.

Bagi Amir, definisi tersebut terasa sangat relevan ketika diterapkan pada partai politik Islam yang ada di Indonesia. Rumusan Islam yang digunakan dalam konteks ini bisa dikatakan lebih mengedepankan pemahaman terhadap pemikiran Islam yang bersifat tekstual (skriptural) dan pemikiran Islam yang bersifat esensial (substantif). Singkatnya, realitas politik partai tersebut dinilai berdasarkan prinsip ideologi Islam yang dipegangnya dan dari mayoritas basis massa pendukungnya yang beragama Islam.⁷

Era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 menyaksikan ledakan pertumbuhan pada sektor partai politik Islam. Berbeda dengan masa sebelumnya di mana kekuatan politik Islam hanya terkonsentrasi di PPP, ICMI, dan dua organisasi besar (NU dan Muhammadiyah), kini bermunculanlah sejumlah besar partai Islam baru. Contohnya adalah Partai Keadilan (PK), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Tidak hanya

⁶ Abidin Zainal Rahawarin, *Dinamika Partai Politik Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 35–37.

⁷ Rahwarin Abidin Zainal, *Dinamika Partai Politik Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 43–44.

partai, berbagai gerakan dan kelompok Islam lainnya juga mengalami perluasan dan kemajuan yang pesat.⁸

Indonesia berhasil memasuki era politik demokratis berkat pelaksanaan Pemilu 1999. Namun, prosesnya tidak luput dari kritik, terutama karena keterlibatan anggota partai politik dalam badan penyelenggara seperti KPU dan PPI. Selain itu, keberatan dari beberapa partai peserta menyebabkan penetapan hasil pemilu tertunda dan diselimuti ketidakpastian. Akibat situasi ini, Presiden BJ Habibie, selaku kepala negara yang memegang tanggung jawab akhir atas pemilu, terpaksa turun tangan untuk mengesahkan hasilnya.

Dalam Pemilu 1999, sistem yang diterapkan masih sistem proporsional dengan daftar tertutup, yang mengharuskan pemilih hanya mencoblos logo partai. Meskipun demikian, sebagian kalangan tetap melihat Pemilu ini sebagai langkah yang signifikan menuju demokrasi karena telah membuka peluang yang lebih besar bagi rakyat untuk memilih. Dengan 48 partai politik yang berpartisipasi, masyarakat memang disajikan pilihan yang melimpah ruah, meski hal ini berpotensi membingungkan.⁹

Meskipun partai-partai Islam berkembang subur dan merasa optimis akan mendominasi Pemilu 1999 pada awal era Reformasi, hasil akhirnya menunjukkan kebalikan dari yang diharapkan. Dari 21 partai Islam yang menjadi peserta, hanya 10 yang berhasil mengamankan setidaknya satu kursi di DPR. Temuan studi menunjukkan bahwa, terlepas dari fakta bahwa mayoritas warga Indonesia adalah Muslim, partai-partai Islam tidak mendapatkan sokongan elektoral yang kuat dari konstituen seiman.

Gagalnya partai-partai Islam dalam memenangkan pemilihan umum pertama di masa Reformasi ini sangat memukul para pimpinannya. Cita-cita mereka untuk memegang tampuk kepemimpinan nasional menjadi sulit dicapai. Pasca-Pemilu 1999, semangat para kader menurun (demoralisasi). Sejarah keberadaan partai politik Islam di kancah demokrasi Indonesia selalu dibayangi oleh dinamika politik

⁸ Gonda Yumitro, *Partai Islam dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 17, (2013), hlm. 41-42.

⁹ Indra Pahlevi, "Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi Di Indonesia," Journal Politica 5, no. 2 (2014): 111–112.

yang tidak menentu. Hal ini merupakan cerminan dari kemajemukan bangsa Indonesia yang sangat beragam, tidak hanya terbatas pada umat Islam saja.¹⁰

Pemilu kedua era Reformasi diselenggarakan pada 2004, mencakup Pemilu Legislatif¹¹ pada 5 April dan Pemilu Presiden yang diadakan dua putaran pada 5 Juli dan 20 September.

Sebagai kota terbesar, Bandung memiliki sejarah politik yang panjang dan sering berfungsi sebagai barometer arah politik. Dominasi Islam ini berakar pada kenyataan bahwa Jawa Barat adalah tempat berdirinya dua organisasi pembaharu Islam utama, Persis dan Persyarikatan Ulama, sebab:

1. Kedua organisasi tersebut didirikan di Bandung, Jawa Barat.
2. Mereka menerapkan pendekatan persuasif melalui organisasi modern.
3. Keduanya turut serta berpartisipasi dalam kegiatan dan partai politik.¹²

Bandung, sebagai ibu kota Jawa Barat, memiliki keterikatan yang kuat dengan aspek-aspek keagamaan Islam. Secara kasat mata, terlihat jelas bahwa masyarakat Kota Bandung saat ini sangat menghargai keberagaman, terutama dalam hal keagamaan. Mereka juga sangat proaktif dalam terlibat pada isu-isu kemanusiaan, di mana gerakan-gerakan tersebut sering kali berlandaskan nilai-nilai Islam. Hal ini disebabkan Kota Bandung merasakan langsung dampak dari arus globalisasi teknologi informasi yang sangat terbuka dan mudah diakses, memfasilitasi pendalaman kajian-kajian keagamaan.¹³ Dengan demikian, partai yang berdasarkan ideologi Islam dapat selaras dengan kondisi sosiologis masyarakat Kota Bandung. Sebagai Partai Keadilan (PK) dalam Pemilu 1999, partai ini hanya

¹⁰ N Nasuhaidi and D Subekti, "Pola Kekuatan Partai Politik Islam Indonesia Dalam Pemilu Di Era Reformasi," ... *UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu ...* 8 (2024): 84–85, <https://online-journal.unja.ac.id/jisip/article/view/35483%0Ahttps://online-journal.unja.ac.id/jisip/article/download/35483/18544>.

¹¹ Berdasarkan KBBI, kata legislatif memiliki makna: Berwenang membuat undang-undang; Badan yang bertugas membuat undang-undang. Sedangkan secara etimologis, legislatif merujuk pada kekuasaan atau badan yang memiliki kewenangan untuk "membawa atau menetapkan hukum". Konsep ini menjadi populer dalam teori politik modern, khususnya dalam *Trias Politika* yang dikemukakan oleh Montesquieu, yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga: Legislatif (pembuat UU), Eksekutif (pelaksana UU), dan Yudikatif (pengawas UU).

¹² Fauzan Ali Rasyid, *Pasang Surut Partai-Partai Islam di Jawa Barat Pada Pemilu 1955-2009*, (Bandung, Sentra Publik Indonesia: 2020), hlm. 80.

¹³ Ervin Yanuar, *Resonansi Wacana Politik Identitas Dalam Kemenangan PKS Pada Pileg Tahun 2019 di Kota Bandung*, (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati: 2023) hlm. 4.

berhasil mengumpulkan 1,36% suara (sekitar 1.436.565) di tingkat nasional dan gagal menempatkan wakilnya di kursi DPR-RI. Kemudian pada tahun 2002, PK bertransformasi dan terlahir kembali dengan nama Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pada Pemilu 2004, PKS mampu menunjukkan peningkatan perolehan suara yang sangat signifikan. Partai ini sukses meraih sekitar 7,34% atau 8.325.020 dari total suara, serta berhasil menempatkan 45 wakil di DPR. Selain sukses secara nasional, partai yang berawal dari Lembaga Dakwah Kampus (LDK) yang digerakkan oleh anak-anak muda Tarbiyah ini juga berhasil membangun basis politik yang kuat di berbagai daerah.¹⁴ Di Kota Bandung, keberhasilan PKS sangat mencolok, bahkan berhasil meningkatkan jumlah suara hingga 500% dan menjadi partai Islam dengan perolehan suara terbanyak. Total PKS meraih 260.142 suara dan mengamankan 11 kursi di DPRD Kota Bandung.

Pemilu 2004 merupakan titik balik penting dalam sejarah politik Indonesia pasca-Reformasi. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi krusial untuk mengurai model, pola pergerakan, strategi, dan taktik yang digunakan oleh partai politik Islam seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), khususnya di Kota Bandung saat Pemilu 2004. Pemilu kali ini berbeda dari yang sebelumnya, karena untuk pertama kalinya pasca-Reformasi, anggota lembaga-lembaga negara yang dibentuk melalui pemilu dipilih secara langsung oleh rakyat. Penelitian semacam ini dapat memperjelas strategi yang memengaruhi keberhasilan PKS dalam pemilu, sekaligus memperkaya pemahaman mengenai peta kekuatan partai Islam di Kota Bandung. Dengan membandingkan hasil Pemilu 1999 sebagai titik acuan, penelitian ini memberikan analisis mendalam mengenai transformasi kinerja serta strategi kampanye yang diterapkan PKS hingga mencapai hasil signifikan pada Pemilu 2004.

Dari pemaparan diatas penulis tertarik untuk mengkaji “Strategi Pemenangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pada Pemilihan Umum Di Kota Bandung Tahun 1999&2004”.

¹⁴ Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Agung ke Gedung Parlemen*, (Yogyakarta, LKiS Yogyakarta: 2008), hlm. 1.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sejarah PKS di Kota Bandung?
2. Bagaimana Strategi Pemenangan PKS Pada Pemilu di Kota Bandung Tahun 1999 dan 2004?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk Mengetahui Sejarah PKS di Kota Bandung.
2. Untuk Mengetahui Strategi Pemenangan PKS Pada Pemilu di Kota Bandung Tahun 1999 dan 2004.

D. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kajian yang dilakukan untuk memahami hubungan antara topik penelitian kita dengan penelitian-penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini bertujuan agar penelitian yang dilakukan tidak mengulang kajian yang sudah ada, sehingga proses penelitian menjadi lebih efektif.

Penulis akan menguraikan sejumlah penelitian terdahulu serta konsep-konsep yang relevan untuk mendukung kajian berjudul “Strategi Pemenangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pada Pemilihan Umum Di Kota Bandung Tahun 1999&2004”. Untuk itu, dilakukan tinjauan pustaka terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan atau kemiripan dengan topik yang dibahas.

1. Studi pustaka pertama yang penulis temukan yakni Skripsi dengan judul “Strategi Kampanye Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu Tahun 2004-2019 di Kabupaten Tasikmalaya”. Skripsi ini di tulis oleh Asep Miptah Fauzi mahasiswa jurusan Sejarah Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2023. Skripsi tersebut menguraikan strategi kampanye PKS secara berkelanjutan di Kabupaten Tasikmalaya. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada lokus penelitian di Kota Bandung serta batasan waktu yang lebih spesifik. Penulis memfokuskan kajian pada strategi pemenangan pemilu tahun 2004 dengan menempatkan data Pemilu 1999 sebagai instrumen komparatif untuk melihat fluktuasi perolehan suara, sebuah dimensi waktu yang tidak dibahas dalam skripsi tersebut.

2. Studi pustaka yang selanjutnya adalah skripsi berjudul “Peran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pembangunan Politik di Kota Bandung”. Skripsi ini di tulis oleh Risma Ayu Marginia mahasiswa jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2022. Penelitian tersebut memfokuskan kajian pada kontribusi PKS dalam pendidikan politik dan partisipasi masyarakat secara umum. Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian yang lebih spesifik pada aspek elektoral. Jika penelitian Risma membahas peran pembangunan politik, penelitian ini secara khusus membedah strategi pemenangan PKS pada Pemilu 2004 serta melihat perbandingannya dengan hasil Pemilu 1999 untuk memetakan kekuatan basis dukungan partai di Kota Bandung pada awal era reformasi.
3. Studi literatur terakhir yang ditemukan oleh penulis adalah Tesis dengan judul “Dakwah Politik di Parlemen: Studi Kebijakan Dakwah Politik Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung dalam Mewujudkan Bandung Agamis”, yang ditulis oleh Salmiah Rambe, yang merupakan mahasiswa S2 Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tesis ini membahas peran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di lembaga legislatif Kota Bandung, khususnya dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan dakwah politik sebagai upaya mewujudkan visi Bandung Agamis. Fokus kajian skripsi tersebut terletak pada aspek kebijakan publik dan praktik dakwah politik PKS setelah memperoleh representasi di parlemen. Adapun perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus dan ruang lingkup kajian, di mana penelitian ini menitikberatkan pada strategi PKS sebagai partai politik Islam dalam konteks Pemilu 1999 dan 2004 di Kota Bandung, termasuk proses transformasi partai, strategi politik, serta pola dukungan pemilih pada periode awal reformasi.

Sebagai cabang ilmu pengetahuan, sejarah memerlukan pendekatan metodologis yang terstruktur dan sistematis. Pendekatan ini berkaitan dengan langkah-langkah menelusuri, memverifikasi, dan mengolah sumber-sumber sejarah

hingga menghasilkan fakta yang dapat disajikan dalam bentuk tulisan sejarah.¹⁵ Metode yang digunakan dalam penelitian sejarah mencakup empat langkah berikut (1) Heuristik, (2) Kritik, (3) Interpretasi, (4) Historiografi. Adapun penjelasan secara singkat sebagai berikut.

Tahap pertama, heuristik, merupakan proses awal yang berfokus pada pengumpulan berbagai bukti atau sumber sejarah yang relevan. Tahap kedua, kritik, bertujuan untuk menyaring dan mengevaluasi sumber-sumber tersebut guna memastikan keasliannya dan menilai kredibilitasnya. Tahap ketiga, interpretasi, adalah kegiatan menafsirkan atau memberi makna pada sumber-sumber yang telah lulus proses kritik. Tahap terakhir, historiografi, adalah penyusunan ulang peristiwa sejarah dalam bentuk tulisan berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dievaluasi, dan ditafsirkan.¹⁶

1. Heuristik

Dalam langkah pencarian sumber, penulis mengunjungi beberapa Perpustakaan baik Offline dan Online, Seperti Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia, dan iPusnas. Terkait Dinamika dan Perolehan Setiap Partai Ketika Pemilu 2004 Di Kota Bandung, mendapatkan sumber berupa Dokumen, Arsip, dan Juga Sumber Audio Visual. Adapun beberapa sumber yang didapat sebagai berikut.

1. Sumber Primer

a) Tertulis Dokumen

- 1) Falsafah Dasar Perjuangan PKS.
- 2) Hasil Rekapitulasi Pemilu Legislatif PKS di Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat Tahun 1999-2009.
- 3) Dokumen Strategi Pemenangan Pemilu DPD PKS Tahun 2004.

b) Tertulis Buku

- 1) Kompas, “Partai-partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009”, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004

¹⁵ Wasino, Endah Sri, *Metode Penelitian Sejarah: dari Riset Hingga Penulisan*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020), hlm. 14.

¹⁶ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2014), hlm. 90.

- 2) Deliar Noor, et al, “Mengapa Partai Islam Kalah? : Perjalanan Politik Islam Dari Pra Pemilu’99 Sampai Pemilihan Presiden”, Jakarta: Alvabet, 1999.
 - 3) KPU, “Pemilu Untuk Pemula”, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2010.
- c) Tertulis Surat Kabar
- 1) “Raihan Suara Sementara di Kotamadya Bandung”, Surat Kabar Galamedia, edisi 15 Juni 1999
 - 2) Irwan Natsir, “1999 PDIP Mendominasi, 2004 Jabar Jadi Kuning”, Surat Kabar Pikiran Rakyat, edisi 27 April 2004
 - 3) “Partai Keadilan Tak Pernah Berkoalisi”, Surat Kabar Bandung Pos, edisi 2 Juni 1999
 - 4) “Pengumuman Hasil Suara Diubah per Daerah TK. II”, Surat Kabar Galamedia, edisi 4 juni 1999
 - 5) Tim PR, 10 Parpol Teratas di Jabar: PKS dan Partai Demokrat Unggul di Bandung”, Surat Kabar Pikiran Rakyat, edisi 7 April 2004
 - 6) A-76/A-131, “Melejitnya PKS dan PD: Fenomena Cari Alternatif”, Surat Kabar Pikiran Rakyat 7 April 2004
- d) Tertulis Arsip
- 1) Lampiran III. 19 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 652 Tahun 2003: Peta Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kota Bandung
 - 2) Lampiran Model DB-1 DPR: Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pilihan Jawa Barat
 - 3) Lampiran Model DB-1 DPD: Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pilihan Jawa Barat
 - 4) Lampiran Model DB-1 DB-1 DPRD Provinsi: Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat 1
 - 5) Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota: Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Daerah Pemilihan Bandung 1-6

- 6) Surat Keputusan DPW PKS Jabar, “Revisi Pengurus Dewan Pimpinan Daerah PKS Kota Bandung”, (Nomor: 122/SKEP/AJ-PKS/XI/1424).
- e) Undang-Undang
- 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, tentang Pemilihan Umum
 - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999, tentang Partai Politik
 - 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD
 - 4) Undang-undang No. 12 Thn 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan, DPRD.
- f) Wawancara
- 1) Bpk. Ahmad Kuncaraningrat (50), Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPD PKS Tahun 2004.
 - 2) Bpk. Alfadin Mushor (53), Bendahara Umum DPD PKS Kota Bandung Tahun 2004.
- g) Internet
- 1) Website Resmi KPU Kota Bandung <https://kota-bandung.kpu.go.id/>
 - 2) Website Resmi KPU Pemilu tahun 2004, <https://www.kpu.go.id/page/read/1114/pemilu-2004>
 - 3) Website Resmi Kpu Pemilu Tahun 1999, <https://www.kpu.go.id/page/read/11/pemilu-1999>
 - 4) Youtube Iklan Partai PKS, <https://youtu.be/sI4SFaHPmRw?si=ESWUMu6BKEFkDAw0>
 - 5) Youtube Kampanye Partai PKS, <https://youtu.be/sI4SFaHPmRw?si=ESWUMu6BKEFkDAw0>
2. Sumber Sekunder
- a) Tertulis Buku
- 1) Burhanuddin Muhtadi, “Dilema PKS Suara dan Syaria”, (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia, 2012).
 - 2) M. Imdadun Rahmat, “Ideologi Politik PKS: Dari Mesjid Kampus Ke Gedung Parlemen”, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2008).
- b) Tertulis Dokumen

- 3) Badan Pusat Statistik, “Kota Bandung Dalam Angka 2004/2005”, (Bandung, BPS Kota Bandung, 2008)
- b) Tertulis Jurnal
 - 1) Ach. Basyir, “Ideologi Politik Dilematis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Antara Gerakan Tarbiyah dan Pragmatisme”, *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia* 3, no 2, 2014

2. Kritik

Setelah tahap pertama dalam metode penelitian sejarah, yaitu pengumpulan data melalui proses heuristik, langkah selanjutnya adalah melakukan kritik. Tahap ini bertujuan untuk mengevaluasi keabsahan dan kredibilitas sumber-sumber yang telah diperoleh. Salah satu fokus utamanya adalah memastikan otentisitas (authenticity) sumber. Dalam proses ini, semua sumber diverifikasi dan diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu kritik eksternal dan kritik internal.¹⁷

a) Kritik Ekstern

Kritik ekstern bertujuan untuk memeriksa aspek luar dari sumber sejarah, termasuk autentisitas dan keasliannya. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa sumber yang diperoleh benar-benar asli. Sebuah sumber sejarah dianggap aitentik atau asli apabila benar-benar merupakan hasil karya individu yang diklaim sebagai pembuatnya atau sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh pengarangnya.¹⁸

1. Falsafah Dasar Perjuangan PKS. Ini berisi landasan ideologis, moral, dan spiritual yang menjadi pijakan seluruh gerak politik dan organisasi partai. memiliki kondisi yang baik dengan tulisan yang dapat dibaca dengan jelas.
2. Hasil Rekapitulasi Pemilu Legislatif PKS di Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat Tahun 1999-2009. Berisi hasil rekapitulasi partai PKS pada pemilihan umum di kota bandung mulai dari tahun 1999 sampai 2009. Memiliki kondisi yang baik dengan tulisan yang dapat dibaca dengan jelas.
3. Dokumen Strategi Pemenangan Pemilu DPD PKS Tahun 2004. Berisi strategi yang digunakan oleh DPD partai PKS Kota Bandung ketika Pemilu

¹⁷ Sulasman, *Metodologi...*, hlm. 101.

¹⁸ Sulasman, *Metodologi...*, hlm. 102-103

2004. Memiliki kondisi yang baik dengan tulisan yang dapat dibaca dengan jelas.
4. Surat Kabar Galamedia “Raihan Suara Sementara di Kotamadya Bandung”, yang terbit tahun 1999. Menggunakan Bahasa Indonesia, dengan bahan kertas buram, memiliki kondisi yang bagus sehingga tulisannya dapat dibaca dengan jelas.
 5. Surat Kabar Pikiran Rakyat, “1999 PDIP Mendominasi, 2004 Jabar Jadi Kuning”, terbit tahun 2004. Menggunakan Bahasa Indonesia, dengan bahan kertas buram, memiliki kondisi yang bagus sehingga tulisannya dapat dibaca dengan jelas.
 6. Surat Kabar Bandung Pos, “Partai Keadilan Tak Pernah Berkoalisi”, terbit 1999. Menggunakan Bahasa Indonesia, dengan bahan kertas buram, memiliki kondisi yang bagus sehingga tulisannya dapat dibaca dengan jelas.
 7. Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota, lampiran ini didapatkan dengan kondisi yang baik dan dilengkapi logo KPU serta nomor lampiran, tulisan didalamnya juga memiliki kondisi baik dan dapat dibaca dengan jelas.
 8. Lampiran Model DB-1 DPR, lampiran ini didapatkan dengan kondisi yang baik dan dilengkapi logo KPU serta nomor lampiran, tulisan didalamnya juga memiliki kondisi baik dan dapat dibaca dengan jelas.
 9. Lampiran Model DB-1 DPD, yang dikeluarkan Oleh KPU Kota Bandung, lampiran ini didapatkan dengan kondisi yang baik dan dilengkapi logo KPU serta nomor lampiran, tulisan didalamnya juga memiliki kondisi baik dan dapat dibaca dengan jelas.
 10. Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan perundang-undangan ini ditetapkan oleh Pemerintahan Pusat pada tanggal 11 Maret 2003.
 11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999, tentang Partai Politik, yang ditetapkan oleh Pemerintahan Pusat. Ditetapkan Pada tanggal 1 Februari 1999.

12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999, tentang susunan kedudukan MPR, DPR, DPRD, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Undang-undang ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 1999.
13. Website Resmi KPU Kota Bandung, website ini asli karena didalamnya terdapat logo serta format dari KPU yang merupakan sebuah Lembaga negara.
14. Website Resmi KPU Pemilu 2004, website ini asli karena didalamnya terdapat logo BPS yang merupakan sebuah Lembaga negara.

a) Kritik Intern

Kritik internal berfokus pada aspek isi dari sumber sejarah. Tahapan ini bertujuan untuk menilai keandalan dan ketepatan informasi yang terdapat dalam dokumen atau kesaksian sejarah. Dalam penerapannya, analisis internal melibatkan pemeriksaan terhadap berbagai elemen, seperti penggunaan bahasa, gaya penulisan, serta konteks saat dokumen tersebut dibuat.

Kritik internal ini memegang peranan penting dalam studi sejarah karena membantu peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan akurat mengenai peristiwa masa lalu, sekaligus memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan didasarkan pada data yang sah dan terpercaya.

1. Falsafah Dasar Perjuangan PKS. Falsafah dasar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memuat struktur pemikiran yang kuat berakar pada ideologi Islam, khususnya pandangan Islam sebagai sistem yang menyeluruh (*kaffah*).
2. Hasil Rekapitulasi Pemilu Legislatif PKS di Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat Tahun 1999-2009. Didalamnya berisi angka hasil rekapitulasi partai PKS pada pemilihan umum di kota bandung mulai dari tahun 1999 sampai 2009.
3. Dokumen Strategi Pemenangan Pemilu DPD PKS Tahun 2004. Berisi strategi yang digunakan oleh DPD partai PKS Kota Bandung ketika Pemilu 2004.
4. Surat Kabar Galamedia “Raihan Suara Sementara di Kotamadya Bandung”, yang terbit tahun 1999. Berisi Perhitungan sementara suara parpol-parpol yang mengikuti Pemilu tahun 2004 di tingkat Kotamadya Bandung.

5. Surat Kabar Pikiran Rakyat, “1999 PDIP Mendominasi, 2004 Jabar Jadi Kuning”, terbit tahun 2004. Berisi tentang Kenaikan suara PKS pada Pemilu 2004 setelah Pemilu 1999 mengalami kekalahan dari PDIP.
6. Surat Kabar Bandung Pos, “Partai Keadilan Tak Pernah Berkoalisi”, terbit 1999. Berisi tentang pernyataan Ketua DPP Pusat bahwa PKS tidak berkoalisi dengan partai manapun pada Pemilu 1999.
7. Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Naskah Undang-undang ini dapat dijadikan sebagai sumber primer karena didalamnya mengatur berbagai aspek penting terkait penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Seperti definisi dan prinsip dasar pemilihan umum, Mengatur siapa saja yang dapat menjadi peserta pemilu, yaitu partai politik yang terdaftar, Mengatur siapa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu, jumlah kursi yang tersedia, menetapkan peraturan kampanye,dll.
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999, tentang Partai Politik, yang ditetapkan oleh Pemerintahan Pusat. Naskah Undang-undang ini dapat dijadikan sebagai sumber primer karena didalamnya mengatur berbagai aspek penting terkait pendirian, fungsi, hak, dan kewajiban partai politik di Indonesia, termasuk ketentuan terkait keikutsertaan partai politik dalam pemilihan umum.
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999, yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, Naskah Undang-undang ini dapat dijadikan sebagai sumber primer karena didalamnya mengatur berbagai aspek penting tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
10. Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota, lampiran ini merupakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Bandung dimulai dari daerah pemilihan 1 sampai dengan 6.
11. Lampiran Model DB-1 DPR, didalamnya berisi nama-nama dan hasil perolehan suara calon anggota DPR Jabar di Kota Bandung.

12. Lampiran Model DB-1 DPD, berisi nama-nama dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara calon anggota DPD Jawa Barat di Kota Bandung.
13. Website KPU Kota Bandung, website ini berisi surat keputusan, surat lampiran, dan informasi lainnya mengenai pemilu kota Bandung.
14. Website Resmi KPU Pemilu 2004, website ini berisi tentang sistem pemilu, dasar hukum pemilu, pelaksanaan pemilu, informasi partai-partai peserta pemilu 2004.

3. Interpretasi

Penafsiran dalam sejarah mengacu pada usaha untuk menjelaskan fakta-fakta sejarah sekaligus menentukan relevansi suatu topik tertentu. Karena bersifat dinamis, penafsiran sejarah tidak pernah bersifat mutlak atau final. Setiap generasi memiliki kebebasan untuk membangun pemahaman mereka sendiri mengenai peristiwa-peristiwa sejarah. Dalam studi sejarah, penafsiran sering dianggap sebagai bentuk analisis, yaitu proses memecah elemen-elemen sejarah. Tujuan utama dari penafsiran ini adalah melakukan sintesis, yakni menyatukan berbagai fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah. Dengan menggunakan teori, fakta-fakta tersebut diorganisasi menjadi suatu pemahaman yang lengkap dan menyeluruh.

Penulis menemukan fakta bahwa Pemilu 1999, sebagai pemilu pertama pasca-runtuhnya rezim Orde Baru, menjadi titik awal kiprah politik Partai Keadilan (PK) di Kota Bandung yang saat itu hanya berhasil mengamankan satu kursi di DPRD. Kondisi ini menjadi pembanding yang kontras dengan Pemilu 2004, yang merupakan pemilihan umum pertama setelah amandemen UUD 1945. Dalam rentang waktu tersebut, PKS menunjukkan dinamika perkembangan yang signifikan, di mana pada Pemilu 2004 terjadi lonjakan dukungan suara yang drastis dari masyarakat Kota Bandung. Perbedaan hasil yang mencolok antara kedua periode tersebut mengindikasikan adanya efektivitas strategi pemenangan yang diterapkan oleh PKS pada tahun 2004, yang menjadi fokus utama dalam analisis penelitian ini.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Sejarah Politik karena memuat narasi dan analisis peristiwa, pemilih, dan partai politik.¹⁹ Adapun dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan Teori Peristiwa Sejarah Sartono Kartodirdjo²⁰. Di dalam bukunya Sartono Kartodirdjo membagi definisi sejarah ke dalam dua aspek:

1. Sejarah dalam arti subjektif, yaitu konstruksi atau bangunan yang disusun oleh penulis dalam bentuk uraian atau narasi. Uraian ini merupakan suatu kesatuan yang menghubungkan berbagai fakta untuk menggambarkan suatu fenomena sejarah, baik dalam bentuk proses maupun struktur. Unsur-unsur dalam kesatuan ini saling berkaitan, menopang, dan bergantung satu sama lain.
2. Sejarah dalam arti objektif, yang mengacu pada kejadian atau peristiwa itu sendiri, yaitu proses sejarah sebagaimana adanya. Peristiwa ini hanya terjadi sekali dan tidak dapat diulang. Bahkan bagi individu yang mengalami langsung kejadian tersebut, hanya sebagian dari totalitas peristiwa yang dapat diamati dan diikuti, sehingga tidak mungkin memperoleh gambaran keseluruhan secara langsung.

Teori ini sangat relevan dengan penelitian yang diajukan karena penelitian ini merupakan sebuah konstruksi yang disusun oleh peneliti berdasarkan fakta-fakta sejarah yang ditemukan di lapangan. Narasi mengenai Strategi Pemenangan PKS dalam Pemilu 1999 dan 2004 di Kota Bandung akan dirangkai menjadi satu kesatuan yang menggambarkan proses politik dan taktik perebutan suara yang terjadi pada saat itu. Berbagai elemen, seperti formulasi strategi kampanye, efektivitas mobilisasi massa, perolehan suara, serta faktor-faktor determinan lainnya yang memengaruhi keberhasilan strategi PKS di Kota Bandung, akan disusun secara sistematis dalam analisis penelitian ini.

Pemilu tahun 1999 dan 2004 sebagai suatu peristiwa politik merupakan kejadian faktual yang telah terjadi dan bersifat *einmalig* (sekali terjadi). Penelitian ini berusaha merekonstruksi peristiwa tersebut, khususnya dalam konteks

¹⁹ https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Sejarah_politik, (Diakses pada 28 Oktober 2024 pukul 09.45 WIB)

²⁰ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Ilmu Sejarah*, (Jakarta, Gramedia: 1992), hlm. 14-15.

implementasi strategi pemenangan PKS di Kota Bandung berdasarkan data dan sumber yang tersedia. Sebagaimana dijelaskan oleh Sartono Kartodirdjo, penelitian ini hanya dapat menangkap sebagian dari totalitas peristiwa politik yang terjadi, karena keterbatasan akses terhadap informasi yang terdokumentasi atau ingatan narasumber. Dengan demikian, pendekatan Sartono Kartodirdjo membantu peneliti untuk tidak sekadar memaparkan fakta sejarah secara kronologis, melainkan menyusun sebuah narasi interpretatif yang memberikan pemahaman mendalam mengenai logika di balik strategi pemenangan PKS di Kota Bandung pada periode tersebut.

4. Historiografi

Setelah mengkaji data yang ada, sejarawan perlu memperhatikan struktur dan gaya bahasa dalam penulisan mereka. Penting bagi mereka untuk memastikan bahwa ide utama yang disampaikan mudah dimengerti oleh pembaca. Historiografi adalah proses pengorganisasian fakta-fakta beserta maknanya secara kronologis atau diakronis dan terstruktur, hingga membentuk sebuah narasi sejarah. Kedua aspek ini harus tampak dengan jelas, karena keduanya merupakan elemen krusial dari karya sejarah yang bersifat ilmiah sekaligus menjadi karakteristik sejarah sebagai sebuah disiplin ilmu.¹⁴

Pada tahap terakhir ini, penulis mencoba menghubungkan fakta, data, dan temuan interpretatif yang penulis kumpulkan secara tertulis. Dan dalam penelitian ini penulis menuliskan tentang “Strategi Pemenangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pada Pemilihan Umum Di Kota Bandung Tahun 1999&2004”.

BAB I, Pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, dan Metode Penelitian.

BAB II menjelaskan tentang Sejarah PKS di Kota Bandung. Mulai dari, Kondisi Umum Kota Bandung, dan Sejarah Pembentukan PKS di Kota Bandung.

BAB III, menjelaskan mengenai Strategi Pemenangan Partai PKS Pada Pemilu di Kota Bandung Tahun 1999 dan 2004. Mulai dari, Peta Dukungan Politik PKS Pada Pemilu Di Kota Bandung Tahun 1999 dan 2004, Strategi Pemenangan DPD PKS Kota Bandung Dalam Pemilu 2004, Daftar Calon Anggota Legislatif

DPD PKS Kota Bandung Pada Pemilu Tahun 2004, Kondisi Politik Kota Bandung Setelah Pemilu Selesai Diselenggarakan.

BAB IV adalah bagian penutup yang mana berisi kesimpulan dari Rumusan Masalah.

Daftar Pustaka, berupa pencantuman referensi atau sumber yang digunakan dalam proses penelitian.

Lampiran-lampiran, dilampirkaan foto atau dokumentasi saat melakukan penelitian.

